Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menyelesaikan Konflik Hizbullah-Israel Pada Tahun 2006

Dede Ismail

NIM 20120510168

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY, Jalan Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI.Yogyakarta 22183

Email : Dedeismail0102@gmail.com

Abstrak – *This article the efforts of United Nations to resolve conflict Hizbollah in Lebanon with Israel on 2006. To end this conflict, UN Security Council released resolution 1701. Action taken by UN to prevent the conflict from happening using peacekeeping operation by UNIFIL, peacemaking was established by Kofi Annan as Secretary-General of UN, and peacebuilding by UNDP and FAO to reconstruct condition in Lebanon.*

Kata Kunci – United Nations, Hizbullah, Lebanon, Israel, Resolution 1701, UNIFIL.

PENDAHULUAN

Konflik merupakan tabiat dari kehidupan makhluk baik manusia maupun non-manusia, yang sudah berlaku semenjak makhluk diciptakan sampai pada akhirnya terjadi kepunahan makhluk itu sendiri (Surwandono dan Ahmadi, 2009). Konflik dalam konteks hubungan internasional sering kali terjadi konflik antar negara. Sering kali konflik tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak dan melibatkan pihak ketiga baik negara maupun organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang tujuannya menjaga perdamaian dan keamanan internasional yaitu PBB. Tujuan tersebut tertuang dalam Piagam PBB dalam Bab I. Piagam PBB disusun menjelang berakhirnya Perang Dunia II oleh wakil-wakil dari 50 Pemerintah yang mengadakan pertemuan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Organisasi Internasional di San Francisco dari 25 April sampai 26 Juni 1945. Piagam tersebut dirancang berdasarkan usul yang disusun oleh wakil-wakil dari Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, ketika mereka mengadakan pertemuan di Dumbarton Oaks, Washington, D.C pada bulan Agustus-Oktober 1944. Piagam

tersebut dicetuskan dan ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 oleh wakil-wakil dari 50 Negara yang ambil bagian dalam Konferensi tersebut, yang kemudian disusul oleh negara yang ke-51 yaitu Polandia yang tidak bisa menghadiri pertemuan pada saat itu (Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999). Saat ini hampir semua negara-negara yang ada di dunia ini ikut bergabung dalam PBB. Dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional PBB tidak bisa berjalan sendiri sebagai organisasi internasional, tentunya dalam menjalakan tugas dan fungsinya dibutuhkan dukungan dan bantuan dari anggotanya.

Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurusi masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian (Suryokusumo, 2007).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional PBB telah menyelesaikan beberapa konflik di dunia. Kawasan yang cukup sering terjadi konflik yaitu kawasan Timur Tengah. Di Timur Tengah konflik terjadi antara Israel dengan organisasi militer di Lebanon yaitu Hizbullah. Hingga tahun 2006 tercatat setidaknya dua kali konflik antara Israel dengan Hizbullah. Konflik yang pertama pada tahun 1982-2000 dan konflik yang kedua pada tahun 2006.

Gerakan Hizbullah pertama kali muncul saat berlangsungnya invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982 (Irawan, 2009). Setahun berikutnya anggota Hizbullah melakukan sejumlah aksi dengan meledakkan diri didekat markas Israel yang menewaskan lebih dari 50 orang tentara Israel. Setelah peristiwa tersebut, Hizbullah dikenal sebagai teroris Israel.

Perang antara Israel dengan organisasi militer di Lebanon yaitu Hizbullah (yang berarti partai Tuhan/Allah) dimulai pada 12 Juli 2006 dan berakhir 14 Agustus 2006, perang yang terjadi selama 34 hari. Sebuah perang yang berawal ketika Hizbullah melintasi perbatasan antara Lebanon dan Israel untuk menyerang pasukan Israel (*Israel Defense Forces/IDF*) yang sedang berpatroli dengan jip Humvees di daerah perbatasan bernama Zar'it Shtula. Dalam misi itu, Hizbullah berhasil membunuh tiga anggota IDF dan menyandera dua temannya. Segera setelah misi tersebut berhasil dilaksanakan, mereka kembali ke Lebanon dan membawa dua orang tawanan. Pemimpin Hizbullah, Hassan Nassrallah, mengatakan bahwa dua orang anggota IDF tersebut ditawan sebagai alat untuk menukar anggota Hizbullah yang ditawan oleh Israel. Dua orang yang disandera oleh Hizbullah tersebut bernama Ehud Goldwasser dan Eldad Regev (Lee, 2015).

Di pihak Israel, setelah mendapat kabar bahwa dua jip Humvees yang sedang berpatroli di Zar'it diserang dan dua anggota IDF disandera, segera sebuah tank Israel bernama Merkava Mark II yang berada didekat tempat kejadian berusaha untuk mengejar pasukan Hizbullah yang menyandera dua anggota IDF tersebut. Tetapi, tank tersebut kemudian hancur terkena granat *Improvise Explosive Device* (IED). Empat pasukan Israel yang berada di dalam tank tersebut terbunuh (Lee, 2015).

Setelah peristiwa tersebut pemerintah Israel merespon dengan cara militer. Pasukan militer Israel menyebrang perbatasan Lebanon untuk menggelar serangan dari udara, laut, dan darat. Namun serangan tersebut tidak direspon secara militer oleh Lebanon. Lebanon hanya meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memberikan pernyataan kecaman terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel (Yulianto, 2010). Hal ini dikarenakan tidak seimbangnya kekuatan militer Lebanon dan Israel. Perlawanan justru dilakukan oleh Hizbullah. Selama perang tersebut, kedua belah pihak terus menerus bertukar serangan dengan meluncurkan roket, misil, dan artileri yang kebanyakan menimbulkan kerusakan dan kerugian penduduk sipil yang tinggal di perbatasan Israel dan Lebanon. Dalam sejarah perang Arab-Israel, perang Lebanon pada tahun 2006 ini sedikit berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Strategi Israel ketika berperang dengan bangsa Arab sebelum tahun 2006 selalu mengandalkan serangan dari darat. Tetapi pada perang Lebanon, Israel banyak sekali bergantung pada pasukan udara dan laut untuk mengalahkan Hizbullah. Sedangkan di sisi lain, Hizbullah mengandalkan serangan dari peluncuran roket yang merupakan bantuan dari Suriah dan Iran. Selain berhasil menenggelamkan satu kapal militer Israel, roket-roket tersebut juga berhasil merusak sebuah bandara di kota Israel yang bernama Haifa (Marrero, 2007).

Dengan banyaknya kerusakan dan korban jiwa di dua negara, PBB sebagai organisasi internasional yang tujuannya menjaga perdamaian dan keamanan internasional ikut berupaya menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel karena Lebanon dan Israel merupakan negara anggota PBB. PBB menjadi fasilitator dan menyediakan cara-cara damai non-militer untuk membantu menyelesaikan beragam konflik yang terjadi di dunia (Luke, 2006).

KERANGKA PEMIKIRAN

Penulis menggunakan konsep resolusi konflik yang dianggap sangat relevan dengan upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006, serta definisi operasional untuk membantu mendeskripsikan konsep tersebut.

Menurut Mohtar Mas'oed, definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan jika kita hendak mengetahui eksistensi empiris suatu konsep. Melalui definisi seperti itu, maka suatu konsep dapat dijabarkan. Dengan demikian, maka definisi operasional berarti juga menjabarkan prosedur pengujian yang memberikan kriteria bagi penerapan konsep itu secara empiris (Mas'oed, 1990).

Konsep Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses penyelesaian masalah dalam konflik dengan tidak adanya pemaksaan dan kekerasan dalam mengkontrol konflik. Hal ini berikaitan dengan efisiensi dalam resolusi konflik dalam mengurangi konflik yang telah mengakar dalam (Burton, 1990).

Salah satu konsep yang terkait dengan kerangka kerja resolusi konflik di negara-negara yang mengalami konflik adalah konsep *peacekeeping, peacemaking*,

dan *peacebuilding* yang ditawarkan oleh Johan Galtung. Menurut Johan Galtung ketiga konsep tersebut merupakan tiga tahap dalam penyelesaian konflik (Hermawan, 2007).

Tahap pertama dalam penyelesaian konflik yaitu *peacekeeping. Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral (Hermawan, 2007).

Berdasarkan pengertian *peacekeeping* tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional yaitu: Pertama, menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan merupakan usaha yang dilakukan oleh penjaga perdamaian dengan cara mempertahankan gencatan senjata dalam konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006. Kedua, intervensi militer yang dilakukan dalam konflik Hizbullah-Israel yaitu UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) sebagai pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk oleh PBB dan diberi mandat untuk mempertahankan gencatan senjata, menciptakan zona aman dan perlindungan terhadap operasi kemanusiaan. Ketiga, penjaga perdamaian yang netral berarti UNIFIL tidak memihak kepada siapa pun dalam upaya penyelesaian konflik.

Terkait dengan upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006, PBB melakukan *Peacekeeping Operation* yang merupakan suatu tindakan dilakukan oleh organisasi internasional PBB dengan mengirimkan personel militer di perbatasan kedua negara. Hal ini dikarenakan makin meluasnya intensitas konflik di wilayah Lebanon Selatan yang menghancurkan infrastruktur serta warga sipil menjadi korban.

Operasi menjaga perdamaian (*Peacekeeping Operation*) dibentuk berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dalam *peacekeeping operations* (operasi penjaga perdamaian) ini, secara sah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dengan persetujuan pemerintah yang menginginkan dan juga biasanya pihak-pihak lain yang dapat terlibat. Pihak itu termasuk militer dan personel kepolisian dan juga bersama staf dari pihak sipil. Operasi dapat melibatkan misi pengamatan secara militer, kekuatan penjaga perdamaian, atau juga kombinasi keduanya.

Misi pengamatan militer di atas dilakukan oleh pasukan tidak bersenjata, yang biasanya hanya memonitor sebuah perjanjian atau gencatan senjata. Para tentara dari pasukan perdamaian memiliki persenjataan, namun kebanyakan digunakan untuk melindungi diri sendiri (Basic Facts About The United Nations, 1998).

Peacekeeping merupakan konsep yang dimiliki oleh PBB dalam menanggapi tantangan yang diberikan dunia saat ini dengan melakukan teknik-teknik yang ada kemudian dilakukan pembicaraan antar negara dan juga situasi internal negara yang bertikai akibat perang saudara (Henderson, 1997). *Peacekeeping* merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh organisasi internasional PBB untuk membantu mencapai tujuan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, *peacekeeping* juga merupakan salah satu pilihan yang dilakukan oleh PBB dalam membantu mewujudkan *Peacefull Settlement* dalam penyelesaian setiap konflik, upaya yang dilakukan PBB melalui operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping*) selama bertahun-tahun seperti (Basic Facts About The United Nations, 1998): Mengelola sebuah gencatan senjata atau pemisahan pasukan, melakukan penempatan

pencegahan (menciptakan zona aman), dan melakukan perlindungan dengan operasi kemanusiaan selama konflik berlangsung maupun sesudah konflik berlangsung.

Untuk menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006, PBB melakukan teknik penyelesaian konflik dengan mengirimkan tentara penjaga perdamaian *(peacekeeping operation)* yaitu UNIFIL *(United Nations Interim Force in Lebanon)* berdasarkan Resolusi Nomor 1701.

Tahap kedua dalam penyelesaian konflik yaitu *peacemaking. Peacemaking* (menciptakan perdamaian) yaitu bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi. Atau bisa juga diartikan sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan (Hermawan, 2007).

Berdasarkan pengertian *peacemaking* tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional yaitu: Pertama, bentuk-bentuk intervensi muncul ketika konflik tidak bisa diselesaikan kedua belah pihak. Bentuk intervensi tersebut bisa dengan cara-cara diplomasi. Kedua, cara-cara diplomasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dua minggu setelah diberlakukannya Resolusi Nomor 1701 dengan mendatangi Lebanon dan Israel. Ketiga, merekonsiliasi yaitu proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan. Keempat, mediasi yaitu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi ketika terdapat pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah. Kelima, negosiasi yaitu perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat saja melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Keenam, arbitrasi yaitu bentuk penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkannya bersifat mengikat.

Menurut Vinsensio Dugis dalam bukunya yang dimaksud dengan mediasi yaitu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi ketika terdapat pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah. Kemudian pengertian negosiasi yaitu perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat saja melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Sedangkan penyelesaian konflik melalui arbitrasi terjadi ketika peran pihak ketiga berada pada posisi yang lebih menentukan proses perundingan, yang dimungkinkan karena kewibawaan atau kekuatan lain yang dimiliki oleh pihak ketiga serta mempunyai legitimasi.

Untuk merealisasikan resolusi konflik, maka sesungguhnya yang di implementasikan adalah kombinasi antara konsep negosiasi dan mediasi. Hal ini terjadi oleh karena negosiasi sebenarnya bukan persoalan yang mudah untuk diadakan tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga. Negosiasi seringkali menjadi mustahil dapat berlangsung pada konflik yang bersifat asimetris atau suatu konflik yang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok di antara pihak-pihak yang terlibat. Persepsi pihak yang merasa lebih kuat acapkali merupakan dorongan dan kekuatan baginya untuk tidak mau melakukan perundingan. Sebaliknya juga demikian, pihak yang berada pada posisi lebih lemah acapkali menggunakan posisi tersebut sebagai model untuk mengajukan persyaratan yang dalam proses seringkali memperumit upaya-upaya penyelesaian konflik (Zartman, 1995).

Cara penyelesaian konflik yang ditempuh oleh Hizbullah dan Israel dalam usaha penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yaitu melalui *peacemaking* yang merupakan suatu tindakan dilakukan oleh organisasi internasional PBB dengan cara negosiasi yang melibatkan pihak ketiga (mediator), dimana PBB dengan kredibilitas dan pengalaman yang dimilikinya setelah diberlakukannya gencatan senjata PBB melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak dalam rangka kunjungan ke Lebanon Selatan dan Israel pasca diberlakukannya Resolusi Nomor 1701. Dalam kunjungannya ke Lebanon Selatan PBB meminta agar dua tawanan Ehud dan Eldad segera dikembalikan ke pemerintah Israel, sedangkan dalam kunjungannya ke Israel PBB meminta agar pasukan IDF menarik diri dari Lebanon setalah blokade yang yang dilakukan oleh Israel di Lebanon.

Tahap ketiga dalam penyelesaian konflik yaitu *peacebuilding. Peacebuilding* (menggalang perdamaian) yaitu usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian (Hermawan, 2007).

Berdasarkan pada definisi *peacebuilding* di atas, maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, menciptakan struktur perdamaian berupa keadilan, kesetaraan, dan kerjasama sehingga dapat menangani secara permanen penyebab yang mendasari konflik dan mencegah kedua belah pihak melakukan kekerasan kembali. Struktur perdamaian tersebut dilakukan oleh UNDP dan FAO untuk merekonstruksi pasca terjadinya konflik. Kedua, alternatif penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan membantu dan mengembalikan perekonomian pasca konflik dengan kerjasama satu sama lain yang dapat menguntungkan.

Terkait dengan konflik Hizbullah dan Israel pada tahun 2006, PBB sebagai organisasi internasional melakukan *peacebuilding* oleh organisasi yang berada di bawah naungan PBB yakni UNDP dan FAO. Di mana keduanya berusaha membangun struktur perdamaian yang adil agar semua kembali ke keadaan semula.

METODOLOGI PENELITIAN

Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh data bahan analisa maka penulis memerlukan batasan bahasan dari 2006 hingga 2008 sebagai hasil negosiasi PBB dengan beberapa pihak untuk pertukaran tawanan antara Israel dan Hizbullah. Selain itu juga, penulis mungkin akan sedikit menyinggung masalah di luar fokus pembahasan masalah tersebut dengan tidak keluar dari topik pembicaraan, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan bagimana suatu hal terjadi

atau memaparkan data-data yang ada. Data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang selanjutnya disesuaikan dengan konsep dan teori yang dikenal dalam Hubungan Internasional. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku atau pustaka, jurnal-jurnal, website, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

PEMBAHASAN

Dengan menggunakan konsep resolusi konflik, upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006 yaitu dengan cara melakukan teknik *peacekeeping operation*, *peacemaking*, dan *peacebuilding.*

PELAKSANAAN PEACEKEEPING OPERATION OLEH UNIFIL *(UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON)*

Menurut Resolusi Dewan Keamanan Nomor 425 (1978) dan 426 (1978) pada tanggal 19 Maret 1978, UNIFIL dibentuk untuk memastikan penarikan diri pasukan Israel, memulihkan kembali perdamaian dan keamanan internasional, dan membantu Pemerintah Lebanon untuk menegakkan kembali wewenangnya di wilayahnya (Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999). Menurut Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1701 pada tanggal 11 Agustus 2006, UNIFIL disamping melaksanakan mandatnya di bawah resolusi 425 dan 426 harus (UNIFIL, 2015): memantau penghentian permusuhan, mendukung dan mendampingi Angkatan Bersenjata Lebanon dalam upaya penempatan pasukan di kawasan Lebanon Selatan termasuk di sepanjang perbatasan Garis Biru yang dikosongkan Israel, mengkoordinasikan setiap kegiatan UNIFIL dengan pemerintah Lebanon dan Israel, memperluas akses bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil, membantu Angkatan Bersenjata Lebanon dalam upaya membangun kawasan dan menetralisir segala kekuatan militer selain Angkatan Bersenjata Lebanon dan UNIFIL di kawasan Garis Biru hingga Sungai Litani, membantu pemerintah Lebanon atas permintaannya dalam mengamankan perbatasan-perbatasannya dan pintu masuk lainnya untuk mencegah orang masuk ke Lebanon dengan membawa senjata atau benda sejenis lainnya.

Saat konflik kembali terjadi antara Hizbullah dengan Israel pada tahun 2006 yang berlangsung selama 34 hari, maka untuk mengakhiri konflik tersebut Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1701. Setelah mengeluarkan resolusi tersebut, Dewan Keamanan serta negara-negara Eropa berjanji akan menambah pasukan UNIFIL menjadi 15.000. Italia, Perancis, dan Spanyol masing-masing memberikan kontribusi dua batalion. Negara lain seperti Indonesia, Ghana, India, Malaysia dan Nepal hanya mengirimkan masing-masing satu batalion untuk ditempatkan di kawasan Lebanon Selatan dan sepanjang Garis Biru.

Keberhasilan UNIFIL dalam menjalankan tugasnya memerlukan kerjasama di antara pihak Israel, Lebanon, dan Hizbullah untuk mematuhi resolusi yang sudah disepakati. Tanpa adanya kerjasama di antara pihak-pihak tersebut, maka UNIFIL dalam usahanya menyelesaikan konflik secara permanen akan sulit terwujud.

Mempertahankan Gencatan Senjata

Dengan diberlakukannya Resolusi Nomor 1701 oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 14 Agustus 2006, maka secara resmi isi resolusi tersebut harus di taati oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik yang salah satunya dengan mempertahankan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut berada dalam pengawasan UNIFIL sebagai *peacekeeping* yang netral. Dengan diadakannya proses gencatan senjata, hal tersebut bisa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan proses negosiasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Proses negosiasi tersebut dilakukan oleh UNIFIL sebagai pihak ketiga. Proses negosiasi pun berlangsung dengan mengadakan pertemuan antara UNIFIL, IDF *(Israel Defense Forces)*, dan LAF *(Lebanese Armed Forces)* untuk mendiskusikan persoalan penyerangan roket yang berasal dari wilayah Lebanon ke Israel pada bulan Juli 2006. Selain hal tersebut, ketiga pihak turut mendiskusikan langkah-langkah dalam upaya penetapan Garis Biru serta pengaturan keamanan sementara area-area yang berada dekat dengan perbatasan seperti di bagian utara desa Ghajar (UN News Centre, 2007).

Satu hari setelah pemberlakuan gencatan senjata antara militer Israel dan gerilyawan Hizbullah di Lebanon. Kondisi di masing-masing negara relatif aman karena kedua belah pihak mematuhi gencatan senjata. Warga memanfaatkan waktu jeda perang ini untuk kembali dari pengungsian dan tim medis mengevakuasi korban. Warga Lebanon kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan lega. Pengungsi membanjiri sejumlah jalur yang menghubungkan Beirut dengan Lebanon Selatan. Meski begitu, warga tidak bisa menyembunyikan kepedihan melihat tempat tinggal mereka tinggal puing. Sedangkan sebagian kecil warga memilih tetap tinggal di Beirut, walau harus tidur di taman kota. Mereka khawatir Israel akan mengingkari gencatan senjata (Liputan6, 2006).

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan bahwa Israel akan mematuhi gencatan senjata bila sudah menandatangani Resolusi Nomor 1701. Beberapa hari setelah Israel menandatangani resolusi tersebut pasukan IDF masih berada di wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa pasukannya tetap berada di wilayah Lebanon tujuannya untuk mengantisipasi Hizbullah mendapatkan senjata dari Suriah. Keberadaan Israel di wilayah Lebanon tersebut menunggu sebagian pasukan UNIFIL tiba di perbatasan Israel dengan Lebanon.

Sementara di pihak Hizbullah, pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah mengatakan kelompoknya akan mematuhi resolusi gencatan senjata DK PBB. Dia menegaskan, Hizbullah akan bekerja sama dengan pasukan Lebanon dan PBB (Suara Merdeka, 2006). Hassan Nasrallah bertanggung jawab atas perang yang terjadi dengan Israel yang sudah menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Hassan

Nasrallah tidak menyangka bahwa atas tindakannya menculik dua tentara Israel mengakibatkan perang besar.

Seminggu setelah dikeluarkannya Resolusi Nomor 1701, kondisi konflik di perbatasan Lebanon Selatan dengan Israel Utara setidaknya mengalami penurunan. Namun, dalam praktiknya masih ada insiden-insiden kecil yang harus diselesaikan oleh UNIFIL sebagai pasukan penjaga perdamaian. Insiden kecil tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel maupun Lebanon selama gencatan senjata berlangsung. Dalam hal ini UNIFIL bertanggung jawab melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi di sepanjang Garis Biru.

Menurut pantauan UNIFIL, sejumlah pelanggaran darat seringkali terjadi di sepanjang Garis Biru. Selain pelanggaran darat, UNIFIL juga melaporkan bahwa Israel seringkali melanggar wilayah udara Lebanon. Dalam satu hari Israel melanggar wilayah udara Lebanon sebanyak 15 hingga 20 kali. Kejadian tersebut terjadi hanya beberapa bulan setelah resolusi dikeluarkan. UNIFIL melaporkan kejadian pelanggaran terjadi pada tanggal 31 Oktober 2006 dan 16 November 2006. Penerbangan jet-jet Israel terlihat melewati markas batalion Perancis. Sementara itu di pihak Lebanon, pelanggaran dilakukan oleh warga Lebanon yang melintasi perbatasan kedua negara. Warga Lebanon tersebut yang melintasi batas wilayah kedua negara bisa meningkatkan tensi konflik di sepanjang Garis Biru. Oleh sebab itu, gencatan senjata akan berhasil dalam beberapa hari ke depan jika Israel dan Hizbullah harus menahan diri untuk tidak saling menyerang. Tanpa adanya gencatan senjata, tahap berikutnya mustahil dilaksanakan, bahkan keadaan Lebanon akan semakin memburuk (Yulianto, 2010).

Menciptakan Zona Aman

Mandat UNIFIL menugaskan untuk membantu Angkatan Bersenjata Lebanon memastikan wilayah yang berada di antara Garis Biru hingga Sungai Litani bebas dari senjata dan infrastruktur bersenjata selain LAF dan pasukan UNIFIL. Dukungan UNIFIL juga dilaksanakan melalui latihan gabungan dan pelatihan bersama dengan Angkatan Bersenjata Lebanon dan Angkatan Laut Lebanon.

Dalam menjalankan tugasnya, UNIFIL bersama-sama dengan pasukan Lebanon menciptakan zona aman di perbatasan Israel dengan Lebanon terutama di Sungai Litani yang berjarak kurang lebih 20 km dari perbatasan Israel dengan Lebanon. UNIFIL terus melakukan patroli di Garis Biru dengan pasukan Lebanon (LAF). Hal ini menunjukkan pertama kalinya pasukan Lebanon terjun dengan UNIFIL di lapangan. Satu satuan infantri yang terdiri dari 100 tentara didukung tank-tank, digelar di pos-pos pengawasan yang berada di sektor barat perbatasan Garis Biru, Naqura, pantai Laut Tengah dan Labuneh, serta daerah pedalaman tiga kilometer di timur. Pos-pos tersebut, didirikan dengan bantuan satuan lapis baja dari kontingen Ghana yang berada sekitar 100 meter dari posisi-posisi tentara Israel di bagian lain perbatasan Garis Biru (Antara News, 2006).

Dalam menciptakan zona aman UNIFIL memusnahkan persenjataan-persenjataan yang dapat membahayakan kembalinya konflik antara Hizbullah dan

Israel. Amunisi peledak seperti ranjau dibersihkan oleh UNIFIL. Hasilnya ranjau telah dibersihkan sekitar 28 persen area dari 40 juta meter persegi dan 150.000 alat peledak telah berhasil di sterilkan (UN News Centre, 2008).

Pasukan UNIFIL juga memastikan tidak terjadinya penyelundupan senjata-senjata dan kekuatan bersenjata ilegal ke wilayah Lebanon Selatan. Hal itu menyebabkan UNIFIL harus benar-benar menjaga ketat perbatasan Suriah dan Lebanon karena Hizbullah mendapatkan persenjataan perang dari Suriah salah satunya. Walau UNIFIL menjaga ketat persenjataan yang masuk ke Lebanon, Israel kerap melanggar dengan mamasuki wilayah Lebanon dengan menggunakan jalur udara. Israel mengklaim bahwa militan Hizbullah masih belum seutuhnya memberikan senjata-senjatanya ke pemerintah Lebanon maupun ke UNIFIL.

Perlindungan Terhadap Operasi Kemanusiaan

Konflik yang terjadi di Lebanon dan Israel meletus pada tanggal 12 Juli 2006 hingga 14 Agustus 2006. Konflik tersebut tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban pasukan Israel dan pasukan Hizbullah, namun rakyat sipil di kedua negara turut merasakan penderitaan akan dahsyatnya konflik yang terjadi. Wilayah Lebanon Selatan dan Israel Utara menjadi tempat jatuhnya korban terbanyak yang di mana sebagian besar merupakan warga sipil. Di Lebanon sendiri wilayah yang menjadi sasaran Israel sekaligus operasi terhadap bantuan kemanusiaan meliputi wilayah Tyre, Tripoli, Marjayoun, Bekaa Valley, dan Beirut. Sedangkan di wilayah Israel yang menjadi sasaran Hizbullah meliputi Haifa, Gaza, Nablus, Nahariya, Shelomi, dan Galilee.

Perang antara Hizbullah dan Israel telah menimbulkan kerusakan dan banyak warga yang tewas, sehingga proses bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan. Bantuan kemanusiaan selama perang berlangsung maupun sesudah diadakannya gencatan senjata terus dilakukan terutama dalam bidang medis. Banyak korban yang terkena ranjau sehingga mereka membutuhkan kaki palsu untuk bisa berjalan layaknya seperti orang normal. Pasukan penjaga perdamaian dari batalion India menghabiskan lebih dari dua bulan untuk mengidentifikasi dan mencocokkan kaki palsu bagi para korban yang terkena bom maupun ranjau. Selain itu juga, dalam upayanya memperluas akses kemanusiaan kontingen UNIFIL dari India mendirikan klinik *"Jaipur Foot"* (UN News Centre, 2007).

Hal serupa juga dilakukan oleh Kontingen Indonesia dalam upayanya memperluas akses kemanusiaan di Lebanon. Kontingen Indonesia memberikan bantuan kepada anak-anak Lebanon seperti belajar komputer, kursus bahasa inggris, dan pembangunan taman bermain. Bagi kalangan remaja Kontingen Indonesia mengadakan kegiatan seperti pelatihan P3K, pembangunan lapangan sepak bola, dan menyelenggarakan pertandingan persahabatan sepak bola. Kemudian yang terakhir bagi kalangan dewasa Kontingen Indonesia mengadakan kegiatan seperti pengobatan massal, membantu memanen gandum, memadamkan kebakaran dan memberikan bantuan tenaga pada saat diminta oleh masyarakat setempat (Lesmana, 2010).

Bantuan-bantuan yang dilakukan oleh UNIFIL membuat masyarakat Lebanon senang dengan keberadaan UNIFIL. UNIFIL memanfaatkan gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan Hizbullah, sehingga terhitung dalam beberapa hari setelah diadakannya gencatan senjata UNIFIL telah berhasil membersihkan ribuan meter jalan dari serpihan-serpihan perang, mendistribusikan lebih dari 1.716.680 liter air bersih, menyediakan fasilitas kesehatan dan pemeriksaan gigi untuk lebih dari 3.000 warga sipil di Lebanon Selatan (UNIFIL, 2006).

PELAKSANAAN *PEACEMAKING* OLEH SEKRETARIS JENDERAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Menurut Johan Galtung, *peacemaking* adalah bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi. Atau bisa juga diartikan sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan (Hermawan, 2007). Bentuk intervensi tersebut dalam konflik Hizbullah dan Israel pada tahun 2006 dilakukan oleh PBB sebagai organisasi internasional yang fungsinya memelihara keamanan internasional.

Dalam sejarahnya, PBB telah sering diminta untuk mencegah situasi yang berbahaya untuk tidak berkembang menjadi peperangan, untuk membujuk pihak-pihak yang bertikai menggunakan meja perundingan dan bukan senjata, dan membantu memulihkan perdamaian apabila timbul konflik. PBB juga menyediakan forum perdebatan dan perundingan serta wahana untuk diplomasi diam-diam. Munculnya semangat di antara anggota Dewan Keamanan, dan bertambah siapnya Negara-Negara Anggota untuk memanfaatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan utamanya, telah meningkatkan peranan Sekretaris Jenderal dan fungsinya sebagai saluran komunikasi di antara pihak-pihak. Jasa-jasa baik Sekretaris Jenderal bertambah banyak dimanfaatkan untuk mempertemukan pihak-pihak guna mencapai persetujuan yang adil (Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999).

Dalam upayanya mengakhiri permusuhan konflik Hizbullah dan Israel, PBB melakukan intervensi secara langsung ke pihak Lebanon dan Israel. Dimana intervensi tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan dengan melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak. Jasa-jasa baik yang dimiliki oleh Sekretaris Jenderal diharapkan mampu membawa kepada pihak-pihak yang bertikai mentaati kesepakatan yang sudah ditandatangani yaitu Resolusi Nomor 1701.

Negosiasi PBB Terhadap Lebanon

Sekjen PBB Kofi Annan berada di ibu kota Lebanon pada tanggal 28 Agustus 2006 dua minggu setelah Resolusi 1701 diberlakukan. Annan disambut di bandara Beirut oleh Menteri Luar Negeri Lebanon Fawzi Salloukh (BBC, 2006). Dalam kunjungannya di Beirut, Annan tidak meraih simpati yang bagus. Pemimpin PBB ini

diejek oleh kerumunan yang pro Hizbullah. Hal ini dikarenakan PBB dianggap kurang gesit dalam menghentikan konflik.

Dalam kunjungan tersebut Kofi Annan akan bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora, ketua parlemen Lebanon dan sekutu Hizbullah Nabih Berri, serta sejumlah politisi lain. Serangkaian pertemuan tersebut dibicarakan secara diplomatis dan sensitif. Langkah Kofi Annan melakukan negosiasi dianggap sangat tepat walaupun dengan keterlambatannya PBB mengeluarkan resolusi.

Kofi Annan juga memuji Lebanon yang menghormati gencatan senjata dan menekankan agar Lebanon Selatan menjadi kawasan bebas senjata dan mengharapkan hanya ada satu hukum, satu pihak berwenang dan satu senjata. Hal ini merupakan seruan yang amat jelas kepada Hizbullah agar melucuti senjata walau PBB mengatakan pasukan penjaga perdamaian yang dikirim ke Lebanon Selatan tidak akan menegakkan tugas pelucutan senjata (BBC, 2006).

Serangkaian hasil pertemuan dan negosiasi selama berada di Lebanon, Kofi Annan meminta kepada semua pihak yang berada di Lebanon mematuhi Resolusi Nomor 1701 dan meminta kepada Hizbullah agar dua tentara Israel yang diculik segera diserahkan ke pemerintah Lebanon atau kepada pihak ketiga di bawah pengawasan Palang Merah Internasional. Akan tetapi Menteri Listrik Tenaga Hidro Lebanon, Mohammed Fneish yang juga anggota Hizbullah menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membebaskan sandera Israel tanpa syarat, pertukaran tawanan perang Lebanon dan Israel adalah jalur satu-satunya pembebasan prajurit tentara Israel. Dikatakannya, milisi Hizbullah menangkap dua prajurit dengan tujuan jelas yaitu direalisasinya pertukaran tawanan perang antara Lebanon dan Israel melalui perundingan secara tidak langsung (CRI, 2015).

Setelah kunjungan Kofi Annan pada tahun 2006 ke Lebanon dan Israel, memang persoalan permasalahan tidak hanya terjadi di Lebanon dan Israel saja. Sehingga persoalan yang lain yang terjadi di dunia harus diselesaikan oleh Kofi Annan sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Dalam rangka mengimplementasikan Resolusi 1701 yang salah satu isinya Hizbullah harus melepaskan dua tawanan Israel, seorang pejabat intelijen Jerman Gerhard Conrad ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan sebagai mediator dalam menindaklanjuti adanya pertukaran tawanan (Avni, 2008). Pihak-pihak yang melakukan pertukaran tawanan Hizbullah dan Israel sepakat untuk menerima Gerhard Conrad sebagai saluran tunggal yang menjadi penengah di antara mereka. Gerhard Conrad telah membuktikan kecakapannya selama upaya-upaya pertukaran tawanan sebelumnya dan telah mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak berkaitan dengan negosiasi dan mekanisme-mekanisme pertukaran tawanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Gerhard Conrad terus menemui pihak Hizbullah dan Israel dengan menyelenggarakan berbagai pertemuan yang berlangsung lama. Gerhard Conrad juga tidak hanya menyampaikan pesan begitu saja kepada kedua belah pihak, namun turut mendiskusikan pemecahan masalah dan jalan keluar.

Negosiasi pertukaran tawanan berjalan alot dan berlarut-larut lantaran Israel menuntut Hizbullah membiarkan tim Palang Merah Internasional untuk menemui kedua tentara yang diculik tersebut. Berbagai organisasi kemanusiaan internasional juga menekan Hizbullah untuk mengizinkan bagi tim kemanusiaan PMI untuk

menjenguk keduanya, tapi Hizbullah menolaknya. Hizbullah menginginkan adanya pertukaran tawanan penuh, dimana seluruh tawanan yang berada di Israel dikembalikan ke Lebanon. Setelah hal tersebut dilakukan, maka Hizbullah bersedia melepaskan Eldad Regev dan Ehud Goldwsaser. Sementara itu, di dalam negeri Israel keluarga kedua tentara itu terus mendesak pemerintah Olmert untuk menuntaskan krisis tawanan dengan berbagai cara. Akhirnya sebuah keputusan bulat diambil kabinet Israel yang terdiri atas koalisi berbagai partai itu menyetujui kesepakatan pertukaran tawanan antara Hizbullah dan Israel.

Pertukaran tahanan akhirnya baru terealisasi pada tanggal 16 Juli 2008 dibawah pengawasan Palang Merah Internasional. Kelompok Hizbullah menyetujui perjanjian yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menukar tahanan dengan Israel. Dua tahanan yang disandera pada bulan Juli 2006 Eldad Regev dan Ehud Goldwsaser akhirnya diserahkan kepada pemerintah Israel dalam keadaan tewas. Sementara itu pemerintah Israel menyerahkan 199 jenazah anggota Hizbullah yang tewas di Israel, dan lima tawanan masih dalam keadaan hidup.

Negosiasi PBB Terhadap Israel

Blokade yang dilakukan oleh Israel membuat Lebanon mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Masyarakat Lebanon sendiri membutuhkan bantuan baik itu berupa makanan, pakaian, dan minuman. Kebanyakan dari mereka banyak yang mengungsi akibat perang Hizbullah dan Israel. Dengan adanya blokade akses untuk mendapatkan bantuan tersebut mengalami kesulitan.

Setelah kunjungannya ke Lebanon, Kofi Annan selanjutnya mengunjungi Israel pada tanggal 29 Agustus 2006. Annan pertama-tama mengadakan pertemuan dengan keluarga prajurit yang disandera oleh Hizbullah. Annan mengatakan kepada keluarga prajurit bahwa pada pertemuannya dengan pemerintah Lebanon sebelumnya, Annan sudah mengajak dan meminta Hizbullah melepaskan dua tawanan Israel. Walaupun langkah tersebut sulit terealisasi, Kofi Annan sebagai Sekretaris Jenderal PBB akan terus berupaya melakukan negosiasi terus menerus agar pertukaran tawanan segera terealisasi.

Setelah menemui keluarga Ehud Goldwsaser dan Eldad Regev, selanjutnya Kofi Annan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmerts. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmerts, Kofi Annan meminta blokade yang dilakukan oleh Israel segera untuk ditarik. Akan tetapi Ehud Olmerts menolak permintaan Annan bahwa Israel akan menarik pasukannya dari Lebanon Selatan setelah pasukan PBB mencapai 5.000 (Marsden, 2006). Alasan Israel untuk mempertahankan blokade terhadap Lebanon adalah mencegah Hizbullah memperoleh senjata dari luar negeri untuk disenjatai kembali. Dengan tujuan itu, Israel mengemukakan bahwa pasukan sementara PBB untuk Lebanon tidak saja ditempatkan di Lebanon Selatan dan juga perlu ditempatkan di perbatasan Lebanon-Suriah untuk memutuskan jalan pengangkutan senjata Hizbullah. Tindakan Israel itu tidak berbeda dengan memojokkan Annan. Karena di antara Lebanon dan Suriah tidak terjadi bentrokan, maka mengirim pasukan sementara PBB di perbatasan kedua

negara sama sekali tidak beralasan, dan juga tidak akan disetujui oleh Lebanon maupun Suriah (CRI, 2015).

Jalan tengah yang dilakukan oleh Kofi Annan atas pernyataannya Perdana Menteri Israel Ehud Olmerts, akhirnya UNIFIL disebar dalam beberapa titik untuk memastikan Hizbullah tidak menerima senjata ilegal dari Suriah. Kofi Annan sebagai Sekretaris Jenderal PBB mencoba merealisasikan keinginan Perdana Menteri Israel agar pasukann Israel segera mencabut blokadenya di Lebanon Selatan.

Hampir dua bulan lebih Israel melakukan blokade di Lebanon Selatan membuat masyarakat internasional mengecam aksi yang dilakukan oleh Israel. Aksi yang dilakukan oleh Israel telah melanggar kedaulatan wilayah Lebanon. Akibat tekanan yang makin kuat salah satunya dari PBB, akhirnya Israel menyerah pada 8 September 2006. Blokade laut dan udara dihentikan dan sebagian besar pasukan Israel mulai mengundurkan diri dari Lebanon (Liputan6, 2006).

PELAKSANAAN *PEACEBUILDING* OLEH UNDP DAN FAO

Peacebuilding adalah tindakan pembangunan kembali daerah-daerah yang mengalami kehancuran akibat terjadinya konflik. Untuk mempercepat *peacebuilding* dilakukan identifikasi struktur-struktur lokal yang dapat digunakan untuk memperkuat dan mempersolid perdamaian untuk menghindari dan mencegah terulangnya kekerasan dengan mengatasi akar penyebab dan dampak konflik.

Dalam konflik yang berlangsung selama 34 hari antara Hizbullah dan Israel telah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan, ekonomi, sosial, ketahanan pangan, pertanian, dan infrastruktur dari pihak Lebanon dan pihak Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional melakukan *peacebuilding* pasca konflik. Strategi p*eacebuilding* dilakukan oleh UNDP dan FAO sebagai organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB. UNDP mulai merencanakan pemulihan pasca konflik pada tanggal 2 Agustus 2006 dengan menunjuk seorang koordinator PBB (Tamer-Chammas, 2013). Sedangkan FAO mulai berkontribusi untuk memulihkan keadaan pasca konflik pada bulan November 2006.

Rekonstruksi Oleh UNDP

Perang antara Hizbullah dan Israel yang berlangsung selama 34 hari telah banyak menimbulkan kerusakan khususnya infrastuktur. Banyak bangunan yang terkena oleh bom, rudal, dan roket yang menyebabkan bangunan runtuh dan hancur. Proses UNDP dalam upayanya merekonstruksi puing-puing setelah berakhirnya konflik Hizbullah dan Israel memiliki dana sebanyak US $ 800.000 untuk membersihkan puing di 101 desa dan kota-kota di Lebanon Selatan yang masing-masing menerima hingga US $ 25.000. Dalam merekonstruksi hal tersebut limbah telah banyak dan bertumpuk di Lebanon. Sebagai alternatif untuk membuang limbahnya, UNDP mengusulkan agar limbah tersebut di daur ulang jika bisa di daur ulang. Proyek dilaksanakan di Kawnine dan Shaqra, di mana sekitar 65.000 ton puing hancur (Tamer-Chammas, 2013).

Selain banyaknya puing-puing bangunan yang berserakan, kerusakan paling serius juga terjadi di pelabuhan Ouzaii mengakibatkan hilangnya 328 kapal dan segala peralatannya. Kini pelabuhan tersebut telah dibersihkan dengan bantuan dari UNDP (US $ 100 000) dan pemerintah Lebanon. Total kerusakan diperkirakan mencapai US $ 3 juta, Pemerintah Uni Emirat Arab telah menyumbangkan US $ 1,8 juta langsung ke masyarakat nelayan untuk rehabilitasi (Tamer-Chammas, 2013).

Selain itu juga, peternakan ikan di Hermel di Lembah Bekaa menyebabkan kerugian ikan untuk peternak ikan dengan diperkirakan total sekitar 300 ton ikan hilang dari kolam. Ini adalah kerugian langsung sebagai bibit ikan yang nantinya dapat dipanen dan dijual kembali ikan tersebut. Perkiraan kerugian ini, berdasarkan harga pada penjualan pertama US $ 3 / kg, sekitar US $ 900 000. Estimasi biaya lingkungan dari kerusakan sedang dilakukan oleh *United Nations Environment Program* (UNEP) melalui penilaian lingkungan pasca konflik.

Hutan, Kebun Zaitun, dan Pemulihan Pertanian Oleh FAO

Tiga belas setengah persen dari hutan Lebanon terletak di Selatan, dan 42 persen tanah di Selatan digunakan untuk pertanian. Orang menggembalakan ternak, mengumpulkan kacang-kacangan dan kayu pinus, memproduksi arang dan madu, dan menumbuhkan zaitun, jeruk, dan tanaman obat. Kebun zaitun sangat penting untuk ekonomi di Lebanon Selatan.

Petani tidak dapat mengakses ladang mereka untuk memanen tanaman setelah konflik serta tidak bisa mempersiapkan lahan untuk musim berikutnya karena bom curah. Infrastruktur irigasi hancur, hilangnya hewan, tanaman, perikanan, dan hutan sekitar US $ 280 juta (FAO, 2006).

Pada bulan Agustus 2007, FAO meluncurkan US $ 3,3 juta program untuk membantu me-*restart* pertanian di Lebanon Selatan. FAO memberikan pupuk, benih, hewan ternak, dan bantuan dalam merenovasi rumah kaca. Untuk mengurangi dampak cluster bom pada mata pencaharian masyarakat, dua proyek lainnya sebesar US $ 421.934 untuk budidaya tanaman obat dan aromatik (Tamer-Chammas, 2013).

KESIMPULAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang mempunyai tujuan di dalam Piagamnya yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hampir semua negara yang ada di muka bumi ini bergabung dengan organisasi tersebut yang mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan tersebut bisa berupa kerjasama di antara sesama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, melenyapkan peperangan, menegakkan Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan kemajuan dalam bidang sosial dan politik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai enam badan (organ) utama untuk mencapai tujuannya, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi-Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Dari ke enam badan (organ) utama tersebut Dewan Keamanan adalah organ khusus yang

berdasarkan komposisi dan kekuasaannya dapat menjamin menghindarkan manusia dari bencana peperangan. Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pasal 24 fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan memiliki dua cara dalam penyelesaian konflik internasional. *Pertama,* melakukan penyelesaian sengketa secara damai. *Kedua,* melakukan penyelesaian konflik dengan cara paksaan. Biasanya dalam melakukan penyelesaian konflik, Dewan Keamanan menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu, dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional harus bersifat netral ketika adanya suatu persengkataan. Sikap yang netral yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentunya tidak memihak siapa pun dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi fasilitator dan menyediakan cara-cara damai non-militer. Cara-cara damai non-militer bisa berupa negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan. Apabila Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan cara-cara damai, maka cara kedua dengan tindakan pemaksaan bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tindakan pemaksaan tersebut bisa berupa perang, pembalasan setimpal, pembalasan termasuk embargo, blokade damai, dan intervensi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyelesaikan beberapa konflik di dunia, salah satunya konflik Hizbullah yang berada di Lebanon dengan Israel. Hizbullah adalah organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syi'ah yang berbasis di Lebanon. Hizbullah didirikan pada tahun 1982 dan mempunyai pengaruh besar dalam politik Lebanon dengan memberikan pelayanan sosial, mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, membuka daerah pertanian serta perlayanan lainnya untuk ribuan warga Syi'ah Lebanon.

Berdirinya Hizbullah tidak terlepas dari keberadaan Israel yang selalu mengganggu kedaulatan Lebanon. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, Hizbullah telah menguasai Lebanon Selatan agar dapat menundukkan Israel. Bahkan, Pemerintah Lebanon telah menerima Hizbullah sebagai organisasi perlawanan legal. Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora berpendapat bahwa kehadiran Hizbullah sangat membantu menghindari Lebanon dari kehilangan wilayah.

Dalam sejarahnya hubungan Israel dengan Lebanon bisa dikatakan sebagai hubungan yang kurang harmonis. Berbagai kepentingan Israel ingin didapatkan dari wilayah Lebanon dengan melakukan segala cara. Kepentingan Israel terhadap Lebanon yaitu menginginkan wilayah Lebanon Selatan yang terdapat Sungai Litani, Hasbani dan Wazzani yang merupakan sumber air dan tanah di sekitar aliran sungai tersebut sangat subur. Hal tersebut agar dapat mengalirkan air ke pemukiman penduduk di daerah Israel bagian Utara.

Namun, kepentingan Israel tersebut mendapatkan perlawanan dari Hizbullah selama invasi yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon pada tahun 1978 hingga tahun 2000. Pada tahun 2000, Israel untuk pertama kalinya mundur tanpa syarat dari wilayah yang didudukinya di Lebanon dan kelompok Hizbullah berhasil membebaskan sebagian besar wilayah selatan Lebanon dari pendudukan Israel.

Lebanon dan Israel merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, dalam sesama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak selamanya memiliki hubungan yang harmonis. Pada tahun 2006 sayap militer Lebanon Hizbullah kembali beradu konflik dengan Israel. Penyebab konflik tersebut berawal ketika Hizbullah melintasi perbatasan Lebanon Selatan dan Israel Utara untuk menyerang pasukan IDF yang sedang berpatroli. Dalam misinya Hizbullah berhasil menculik dua tentara IDF. Pemimpin Hizbullah Nasrallah mengatakan bahwa dua tentara IDF tersebut dijadikan sebagai alat untuk menukar tahanan Hizbullah yang berada di Israel.

Perang antara Hizbullah yang dimulai pada tanggal 12 Juli 2006 hingga 14 Agustus 2006 telah menewaskan warga sipil baik dari Lebanon maupun Israel. Selain itu juga akibat dari perang tersebut sejumlah bangunan mengalami kerusakan yang parah. Seruan dari pemerintah Lebanon dan masyarakat internasional untuk mengakhiri konflik keduanya tidak berpengaruh untuk menghentikan aksi kekerasan tersebut. Dengan begitu konflik tersebut mendapatkan perhatian dari Dewan Keamanan PBB yang tugasnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam upayanya menyelesaikan konflik tersebut, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 11 Agustus 2006 mengeluarkan Resolusi Nomor 1701. Resolusi tersebut disetujui oleh pemerintah Lebanon dan Hizbullah pada tanggal 12 Agustus 2006. Sehari setelah Lebanon menyetujui resolusi tersebut, kabinet Israel mengadakan sidang mendadak dan hasilnya menyatakan Israel menyetujui resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Pada tanggal 14 Agustus secara resmi resolusi tersebut diberlakukan.

Salah satu konsep dalam kerangka kerja resolusi konflik di negara-negara yang mengalami konflik adalah konsep *peacekeeping, peacemaking,* dan, *peacebuilding.* Konsep resolusi konflik tersebut bisa dijalankan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kaitannya dengan upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006 Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan konsep *peacekeeping, peacemaking,* dan *peacebuilding.*

Peacekeeping Operation dibentuk berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dalam *peacekeeping operations*, secara sah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dengan persetujuan pemerintah yang menginginkan dan juga biasanya pihak-pihak lain yang dapat terlibat. *Peacekeeping Operation* dijalankan oleh UNIFIL *(United Nations Interim Force in Lebanon),* UNIFIL telah berhasil menjalankan tugasnya seperti mempertahankan gencatan senjata, menciptakan zona aman, dan perlindungan terhadap operasi kemanusiaan. Ketiga tugas tersebut dijalankan oleh UNIFIL dengan baik secara independen maupun dilakukan bersama dengan tentara Lebanon.

PBB juga meminta kepada para negara anggotanya untuk membantu menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006. Italia, Perancis, dan Spanyol masing-masing memberikan kontribusi dua batalion. Negara lain seperti Indonesia, Ghana, India, Malaysia dan Nepal hanya mengirimkan masing-masing satu batalion untuk ditempatkan di kawasan Lebanon Selatan dan sepanjang Garis Biru. Keberadaan UNIFIL di nilai berhasil menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel. Terbukti dalam beberapa hari setelah diberlakukannya

gencatan senjata keadaannya lebih tenang dan warga kembali ke rumahnya masing-masing untuk melakukan aktivitas seperti biasanya.

Selain *Peacekeeping* dalam upayanya menyelesaikan konflik tersebut, PBB juga melakukan *Peacemaking* untuk mengakhiri konflik secara permanen. *Peacemaking* tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan dengan mendatangi Lebanon pada tanggal 28 Agustus 2006. Di Lebanon, Kofi Annan bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora, ketua parlemen Lebanon dan sekutu Hizbullah Nabih Berri, serta sejumlah politisi lain.

Hasil pertemuan tersebut Kofi Annan meminta kepada semua pihak yang berada di Lebanon mematuhi Resolusi Nomor 1701 dan meminta kepada Hizbullah agar dua tentara Israel yang diculik segera diserahkan ke pemerintah Lebanon atau kepada pihak ketiga di bawah pengawasan Palang Merah Internasional. Beberapa bulan setelah pertemuan Kofi Annan dengan pemerintah Lebanon, Kofi Annan menunjuk pejabat intelijen Jerman Gerhard Conrad sebagai mediator dalam menindaklanjuti adanya pertukaran tawanan. Pihak Israel dan Hizbullah menyetujui Gerhard Conrad sebagai mediator dalam upayanya melakukan pertukaran tawanan. Negosiasi pertukaran tawanan berjalan alot dan berlarut-larut lantaran Israel menuntut Hizbullah membiarkan tim Palang Merah Internasional untuk menemui kedua tentara yang diculik tersebut, akan tetapi Hizbullah menolaknya. Hizbullah juga menginginkan pertukaran tawanan secara penuh, dimana seluruh tawanan yang berada di Israel harus dilepascan. Jika hal tersebut dilakukan, maka Hizbullah bersedia untuk melepascan dua tawanan Ehud Goldwsaser dan Eldad Regev.

Upaya negosiasi Kofi Annan dan Gerhard Conrad baru terealisasi pada tahun 2008. Pada bulan Juli 2008 Hizbullah dan Israel menyepakati pertukaran tawanan dibawah pengawasan Palang Merah Internasional. Dua tahanan yang disandera pada bulan Juli 2006 Eldad Regev dan Ehud Goldwsaser akhirnya diserahkan kepada pemerintah Israel dalam keadaan tewas. Sementara itu pemerintah Israel menyerahkan 199 jenazah anggota Hizbullah yang tewas di Israel, dan lima tawanan masih dalam keadaan hidup.

Sehari setelah kunjungannya ke Lebanon, Kofi Annan pada tanggal 29 Agustus 2006 mengunjungi Israel untuk melakukan negosiasi kepada Perdana Menteri Israel Ehud Olmerts. Serangkaian pertemuan tersebut Kofi Annan meminta kepada Ehud Olmerts agar pasukannya menarik diri dari wilayah Lebanon. Satu minggu lebih setelah negosiasi Annan kepada pemerintah Israel di nilai berhasil. Pada tanggal 8 September 2006 Israel akhirnya menghentikan blokade darat dan udara.

Setelah melakukan *peacekeeping* dan *peacemaking*, maka langkah selanjutnya dalam memulihkan perdamaian di Lebanon PBB melakukan *peacebuilding*. *Peacebuilding* dilakukan oleh UNDP dan FAO sebagai organisasi yang berada di bawah naungan PBB. UNDP dan FAO telah membantu merekonstruksi kondisi Lebanon yang telah rusak akibat konflik yang dilakukan oleh Hizbullah dan Israel.

Dari apa yang diuraikan di atas, PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat diwujudkan melalui peran yang dimainkan PBB dalam proses penyelesaian konflik Lebanon (Hizbullah) dan Israel pada tahun 2006. Hasilnya dalam upaya menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006, Perserikatan Bangsa-

Bangsa telah berhasil melakukan *Peacekeeping, Peacemaking,* dan *Peacebuilding* walaupun masih banyak kendala selama proses tersebut dilakukan. Dengan kata lain, perdamaian antara Israel dan Hizbullah bisa dilakukan apabila difasilitasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burton, John. 1990. *Conflict: Resolution and Provention*. New York: Martin Press.

Hermawan, Yulius. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Irawan, Aguk. 2009. *Rahasia Dendam Israel: Jejak Berdarah Israel di Palestina dan Dunia Arab.* Jakarta: Kinza.

Luke, C Edward. 2006. *UN Security Practice and Promise.* New York: Routledge.

Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.

United Nations. 1998. *Basic Fact About The United Nations*. New York: United Nations Department of Public Information.

Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1999. Jakarta: UNIC.

Suryokusumo, Sumaryo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional.* Jakarta: Tatanusa.

Surwandono dan Sidik Ahmadi. 2009. *Resolusi Konflik Di Dunia Islam.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yulianto, Ari. 2010. *Lebanon Pra dan Pasca-Perang 34 Hari Israel VS Hizbullah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Marrero, Abe F. *The Fourth Dimension: The Israel-Hizbullah Clash and the Shape of Wars to Come.* Armed Forces Journal 144:32-35 May 2007.

Website

Antara News. 2006. *Tentara Lebanon Mulai Berani Duduki Garis Biru.* Dalam http://www.antaranews.com/berita/42963/tentara-lebanon-mulai-berani-duduki-garis-biru. Diakses pada tanggal 25 November 2015.

Avni, Benny. 2008. *Hezbollah's Prisoner Swap Gambit Tests Israel.* Dalam http://www.nysun.com/foreign/hezbollahs-prisoner-swap-gambit-tests-israel/79052/. Diakses pada tanggal 12 Desember 2015.

BBC. 2006. *Kofi Annan Desak Israel-Hizbullah.* Dalam http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/08/printable/060828_annanbeirut.shtml. Diakses pada tanggal 26 November 2015.

BBC. 2006. *Sekjen PBB Kunjungi Lebanon.* Dalam http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/08/060828_annanlebanon.shtml. Diakses pada tanggal 26 November 2015.

CRI. 2015. *Hasil Kunjungan Annan Ke Lebanon Dan Israel Kurang Memuaskan.* Dalam http://indonesian.cri.cn/1/2006/08/31/1@49171.htm. Diakses pada tanggal 26 November 2015.

Lee, R. *The History Guy: The Israel-Hizbullah War 2006*. Dalam http://www.historyguy.com/israel-lebanon_war_2006.html. Diakses pada tanggal 26 Maret 2015.

Liputan6. 2006. *Catatan Akhir Tahun Bidang Mancanegara.* Dalam http://news.liputan6.com/read/134897/catatan-akhir-tahun-bidang-mancanegara. Diakses pada tanggal 26 November 2015.

Liputan6. 2006. *Sehari Gencatan Senjata, Israel-Hizbullah Tenang.* Dalam http://news.liputan6.com/read/127485/sehari-gencatan-senjata-israel-hizbullah-tenang. Diakses pada tanggal 23 November 2015.

Marsden, Chris. 2006. *Kofi Annan visit provokes angry protests in Beirut.* Dalam https://www.wsws.org/en/articles/2006/09/unat-s01.html. Diakses pada tanggal 28 November 2015.

Suara Merdeka. 2006. *Israel Abaikan Resolusi PBB.* Dalam http://www.suaramerdeka.com/harian/0608/13/nas01.htm. Diakses pada tanggal 22 November 2015.

UNIFIL. 2006. *UNIFIL: Helping people in South Lebanon.* Dalam http://reliefweb.int/report/lebanon/unifil-helping-people-south-lebanon. Diakses pada tanggal 22 November 2015.

United Nations Interim Force in Lebanon. 2015. *UNIFIL Mandate.* Dalam http://unifil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11553&language=en-US. Diakses pada tanggal 20 November 2015.

UN News Centre. 2008. *Two years on from war in Lebanon, progress on cluster munitions-UN agency.* Dalam http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=27699. Diakses pada tanggal 25 November 2015.

UN News Centre. 2007. *Lebanon: UN Force Commander meets with Lebanese, Israeli officials*. Dalam http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=23182. Diakses pada tanggal 25 November 2015.

UN News Centre. 2007. *UN blue helmets help Lebanese mine victims.* Dalam http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24451. Diakses pada tanggal 25 November 2015.